

ASPEK SOSIAL-EKONOMI USAHATANI LAHAN KERING¹

Oleh
*Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian,
Fakultas Pertanian, IPB*

Pendahuluan

Pada PJP I, upaya pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan, khususnya swasembada beras, telah dicapai dengan gemilang. Sukses ini dapat dicapai, karena pemerintah telah banyak melaksanakan program pengembangan padi sawah dan lahan sawah. Akan tetapi, pada akhir PJP I dan awal PJP II ini terdapat kecenderungan bahwa swasembada tersebut bersifat kurang stabil, dalam arti terjadinya suatu *exogenous shock*, seperti perubahan cuaca, dapat menyebabkan produksi tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan. Keadaan ini mengisyaratkan upaya yang hanya mengandalkan lahan sawah untuk menghasilkan pangan sudah kurang memadai.

Pemerintah telah menyadari hal tersebut, yang terlihat dari pelaksanaan berbagai program-program pengembangan pertanian di lahan non-sawah, yang tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan padi namun juga bagi komoditas lainnya dengan nilai ekonomi yang relatif tinggi. Namun, tampaknya program-program tersebut belum dilakukan seintensif apa yang telah diterapkan pada lahan sawah pada PJP I. Padahal, potensi lahan kering Indonesia sangat besar dan hanya sebagian kecil saja yang telah dimanfaatkan. Ironisnya, kurangnya perhatian dalam pengembangan lahan kering tidak saja mengancam kelestarian sumberdaya alam pada kawasan lahan kering sendiri (*on site*), namun juga pada lahan sawah yang terdapat di hilir (*off site effect*) yang antara lain dapat terjadi melalui pelumpuran waduk dan rusaknya sistem irigasi, sehingga akhirnya mengancam produksi.

Kondisi lahan kering pada umumnya bersifat marginal, sehingga aktivitas-aktivitas budidaya dan ekonomi sangat terbatas. Keadaan ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakatnya relatif rendah. Oleh karena itu, pengembangan

¹ Makalah Penunjang Diskusi Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Lahan Kering untuk Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Bogor, 27 September 1995.

pertanian di kawasan lahan kering dapat dipandang sebagai kebijakan yang strategis yang memiliki berbagai tujuan, antara lain: (a) peningkatan kesempatan kerja, (b) peningkatan dan pemerataan pendapatan, (c) pengentasan kemiskinan, dan (d) penerapan konservasi sumberdaya alam, khususnya lahan dan air yang dilakukan secara integral dengan kawasan sebelah hilirnya. Pencapaian tujuan-tujuan ini sangat tergantung pada banyak faktor, antara lain (a) ketersediaan prasarana fisik dan sarana pendukung, (b) pemilihan jenis komoditas yang akan dikembangkan di kawasan lahan kering, dan (c) rekayasa dan pembinaan kelembagaan pemandu sistem agribisnis.

Pola Usahatani Lahan Kering dan Kebutuhan Irigasi bagi

Lahan Kering

Pola tanam monokultur sangat jarang ditemui di kawasan lahan kering. Pola tanam ganda (*multiple cropping*) yang diterapkan para petani di kawasan lahan kering, bahkan memiliki keragaman jenis komoditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani di lahan basah (IPB, 1992). Konsekuensinya, proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan petani lahan kering bersifat relatif lebih kompleks. Keragaman jenis tanaman yang diusahakan secara teknis dan ekonomis dapat dibenarkan apabila output yang dihasilkan dapat meminimisasi resiko kegagalan panen sekaligus menjaga kelestarian sumberdaya alam. Mengingat kualitas sumberdaya manusia (petani) lahan kering yang sangat terbatas, kondisi tersebut mencerminkan diperlukannya suatu pembinaan dan penyuluhan mengenai pola usahatani di kawasan lahan kering. Sebelum hal tersebut dilakukan, terlebih dahulu perlu dikembangkan konsep yang mantap mengenai pola pengembangan usahatani di lahan kering. Hal ini membutuhkan penelitian-penelitian yang mendalam untuk kawasan-kawasan pengembangan lahan kering yang spesifik.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penentuan pola tanam, adalah ketersediaan air untuk kebutuhan tanaman. Di lahan kering dengan curah hujan yang memadai, terdapat kecenderungan bahwa jenis tanaman yang diusahakan paling beragam pada bulan-bulan dengan curah hujan tertinggi. Artinya,

terdapat pilihan yang cukup luas untuk menentukan komoditas yang akan dikembangkan. Akan tetapi, pada bulan-bulan kering atau pada kawasan lahan kering dengan curah hujan yang sangat terbatas, pengembangan usahatani tentunya memerlukan irigasi, seperti sistem irigasi pompa. Sistem irigasi gravitasi sejauh ini dipandang belum mampu menjangkau kawasan lahan kering yang justru kerap kekurangan air. Hal ini berarti bahwa pembangunan sistem irigasi baru yang telah menelan biaya besar masih menimbulkan masalah ketidak-merataan distribusi air. Kawasan yang dekat dengan sumber air mendapatkan air yang relatif banyak, sedangkan di kawasan lahan kering sukar mendapat air.

Carruthers dan Stoner (1981) mengemukakan beberapa alasan pemilihan sistem irigasi pompa yang menggunakan *aquifer*, antara lain: (a) biaya investasi yang dibutuhkan relatif murah dibandingkan dengan sistem gravitasi, (b) waktu pembangunan yang lebih singkat, (c) akan lebih sesuai untuk areal yang lebih sempit, dan (d) karena skalanya kecil, pengelolaannya relatif lebih mudah dan dapat dilakukan oleh para petani. Suhartini (1993) antara lain menemukan bahwa untuk kawasan lahan kering di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kediri, sistem irigasi pompa telah mampu meningkatkan intensitas tanam dari sekitar 110-150 persen per tahun (dengan pola tanam padi - palawija - bera) menjadi minimal 300 persen per tahun (dengan pola tanam padi - palawija - palawija).

Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pendapatan

IPB (1992) menemukan bahwa rata-rata ketersediaan tenaga kerja per keluarga adalah 571 HKP per tahun. Sedangkan rata-rata penggunaan tenaga kerja pada berbagai pola tanam *multiple cropping* adalah 317 HKP per tahun, sehingga terdapat tenaga kerja yang menganggur secara terselubung (*disguised unemployment*) sebanyak 254 HKP per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan usahatani di kawasan lahan kering yang dilakukan secara tepat, dapat menyerap setidaknya 254 HKP tenaga kerja tersebut.

Pengembangan usahatani tersebut antara lain dapat dilakukan dengan pendekatan: (a) mengembangkan suatu pola usahatani optimal diantara pola-pola

yang telah diterapkan para petani, atau (b) disamping padi dan palawija, juga dikembangkan jenis-jenis komoditas yang memiliki nilai jual relatif tinggi. Baik butir (a) maupun (b) secara simultan disertai dengan rekomendasi teknologi yang lebih maju, seperti penggunaan benih/bibit unggul, pemakaian jenis pupuk dan cara pemupukan yang paling efisien, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta penyediaan sistem irigasi.

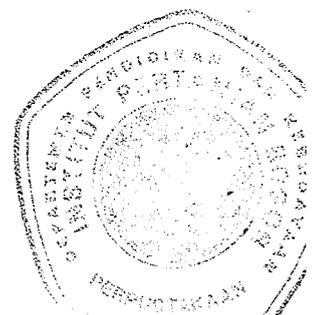
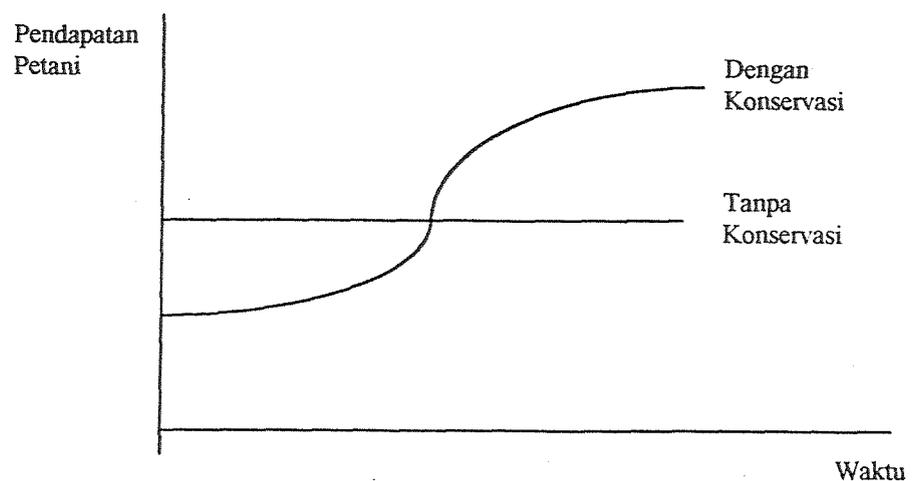
Untuk pendekatan (a), Suhartini (1993) menemukan bahwa pendapatan petani pada berbagai pola tanam padi - padi - palawija atau padi - palawija - palawija mencapai kisaran Rp 1,223 juta - Rp 2,025 juta per hektar per tahun. Sedangkan pendekatan (b) menghasilkan pendapatan yang berkisar Rp 3,644 juta - Rp 8,707 juta per hektar per tahun. Relatif tingginya tingkat pendapatan pada pendekatan (b) disebabkan oleh pengusahaan bawang merah serta lombok (sebagai komoditas bernilai tinggi), secara tumpang gilir dengan padi saja atau dengan padi - palawija. Relatif besarnya tingkat pendapatan ini tidak terlepas dari kontribusi irigasi pompa sebagai salah satu sumberdaya vital yang secara langsung meningkatkan intensitas tanam para petani di lahan kering. Tingkat pendapatan, baik pada pendekatan (a) maupun pada pendekatan (b) melebihi garis kemiskinan. Hal tersebut mengisyaratkan pemanfaatan lahan kering secara tepat dapat mengentaskan kemiskinan.

Kontribusi Irigasi Pompa dan Konservasi

Dengan iuran irigasi pompa sekitar Rp 15,43 - Rp 19,74 per m³ di Kabupaten Gunung Kidul dan Rp 9,07 - Rp 19,84 per m³, Suhartini (1993) menemukan bahwa kontribusi air irigasi terhadap nilai output di kawasan lahan kering pada kedua lokasi tersebut masing-masing mencapai kisaran Rp 22,63 - Rp 215,13 per m³ dan Rp 30,31 - Rp 112,52 per m³. Sepintas angka-angka ini hanya menunjukkan kelayakan finansial pemakaian air irigasi pompa pada lahan kering. Namun, lebih dari itu, tersedianya air irigasi tersebut juga memiliki manfaat tak langsung, antara lain yakni: (a) meningkatnya efektifitas dari faktor produksi lainnya --terutama berbagai jenis pupuk-- sehingga produktivitas (*yield*) meningkat, dan (b) meningkatkan peluang penerapan program ekstensifikasi dan rehabilitasi.

Besaran-besaran pendapatan di atas berlaku untuk berbagai jenis *multiple cropping*. Terlepas dari masalah resiko dan ketidak pastian, penerapan pola tanam monokultur bahkan dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi. IPB (1992) menemukan bahwa besaran pendapatan tersebut dipengaruhi oleh perlakuan konservasi. Cabe merah dan tomat merupakan dua jenis hortikultur yang penanamannya secara monokultur di kawasan lahan kering dapat menghasilkan pendapatan masing-masing Rp 8,690 juta dan Rp 3,547 juta per hektar per tahun jika disertai perlakuan konservasi, dan hanya Rp 2,899 juta dan Rp 0,984 juta per hektar per tahun jika tanpa konservasi. Fakta ini dapat dipandang sebagai justifikasi bagi dimensi konservasi atau upaya pelestarian lingkungan dalam pengembangan pertanian di lahan kering.

Tujuan utama dari konservasi, misalnya dengan pembuatan berbagai jenis teras di lahan kering sesuai kebutuhan, adalah untuk menjaga agar produktivitas lahan sekurang-kurangnya dapat dipertahankan. Walaupun untuk melaksanakan usaha-usaha konservasi membutuhkan biaya yang besar pada tahap awal pembangunan, tetapi secara teoretik dalam jangka panjang produktivitasnya dan pendapatan usahatani akan meningkat. Dengan bantuan grafik, hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut.



Kesimpulan

Usahatani di lahan kering, yang pada umumnya masih dikelola secara tradisional, sangat potensial bagi pengembangan pertanian dan dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar, antara lain: (a) penerapan pola tanam yang optimal untuk setiap lokalita (spesifik lokasi), (b) pemakaian benih/bibit unggul, (c) aplikasi kombinasi pupuk termasuk organik, (d) pengendalian hama terpadu, (e) pembangunan sistem irigasi pompa, dan (f) pelaksanaan konservasi lahan.

Ketergantungan yang besar dari pengembangan pertanian lahan kering pada sumberdaya air, menyebabkan diperlukannya air irigasi dengan kuantitas dan kontinuitas yang cukup. Untuk itu, diperlukan pembangunan sistem irigasi, yang untuk skala kecil jenis yang layak dikembangkan adalah sistem irigasi pompa. Untuk itu, perlu direkayasa suatu kelembagaan tingkat lokal guna pengembangan usahatani lahan kering. Kelembagaan tersebut pada dasarnya menangani operasional alokasi sumberdaya air irigasi pompa, namun sekaligus dapat juga menjalankan fungsi atau kegiatan seperti yang dilaksanakan kelompok tani. Pengembangan sistem irigasi dengan skala yang lebih besar dapat dijajagi, antara lain dengan melibatkan pihak swasta. Hal ini membutuhkan bentuk kelembagaan yang lebih kompleks, yang dapat mengakomodasikan hak dan kewajiban dari pihak petani dan swasta sekaligus. Keenam perbaikan mendasar di atas, serta dua jenis rekayasa kelembagaan ini perlu dikaji secara mendalam pada lokalita-lokalita lahan kering. Untuk itu, dibutuhkan suatu kaji-tindak yang tahapan-tahapannya perlu disusun secara rinci, dan mencakup multi-disiplin.

Daftar Pustaka

- Carruthers, I.D. and Stoner, R. 1981. Economic Aspects and Policy Issues in Groundwater Development. Staff Working Paper No. 496. The World Bank, Washington.
- IPB. 1992. Laporan Studi Peluang Pemanfaatan Lahan Kering untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Pendapatan. Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dengan Program Pascasarjana, IPB.
- Suhartini. 1993. Evolusi Perkumpulan Petani Pemakai Air Irigasi Pompa: Suatu Respon Kearah Pembangunan Berkelanjutan, Tesis tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana, IPB, Bogor.